

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Saronggi merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan Tahun Ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep. Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sumenep, 18 Januari 2024

CAMAT SARONGGI



KUSYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196904101989031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB. I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahun 2023	14
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	14
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realsiasi Anggaran	45
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
BAB. IV PENUTUP	50
LAMPIRAN	52
Surat Keputusan Tentang Tim SAKIP Perangkat Daerah	
Matrik Rencana Strategis	
Surat Keputusan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama	
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kecamatan melaksanakan fungsi :

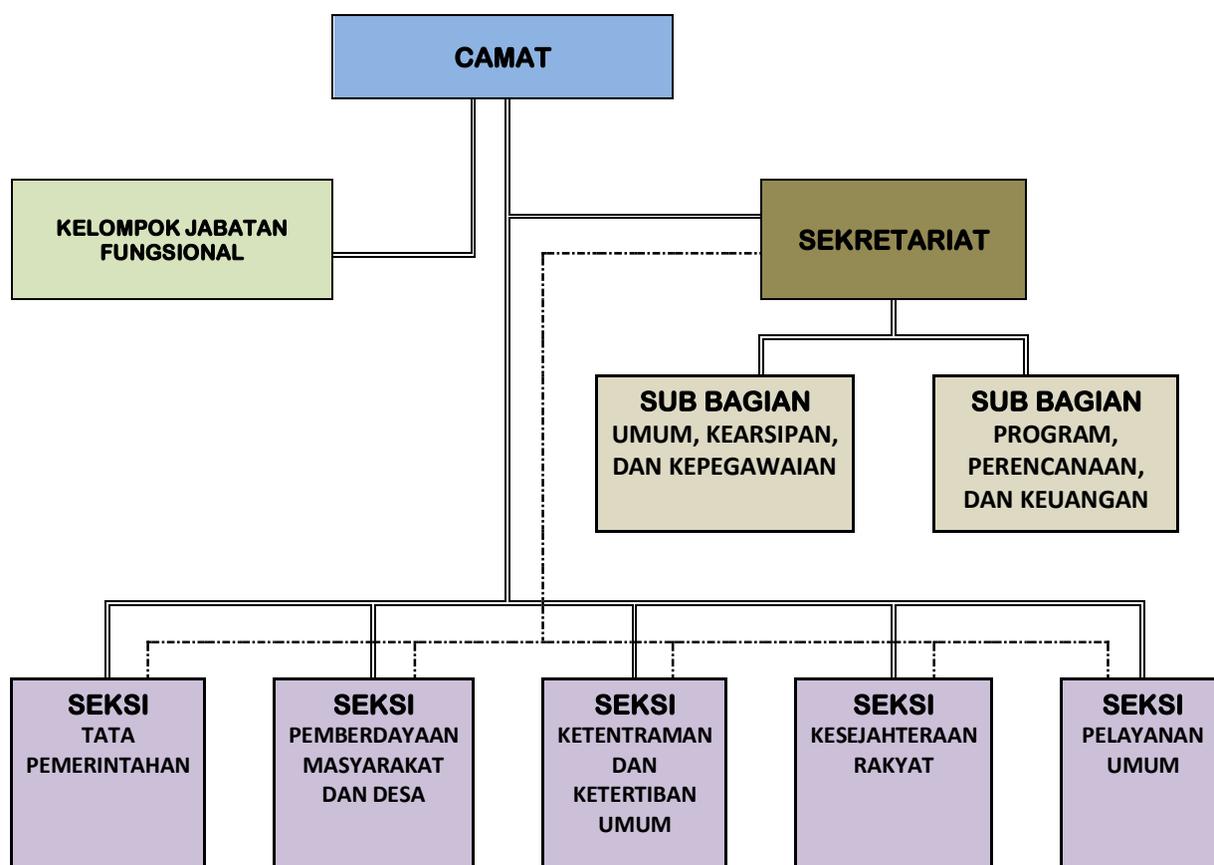
- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Camat Saronggi sebagai pimpinan, yang dibantu oleh :

1. Sekretaris Kecamatan;
2. Kepala Sub Bagian Umum, Kearsipan, dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan;
4. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat;
8. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

Gambar 1.1.



C. ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026, sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
2. Hubungan antara Pemerintahan Desa dan Kecamatan serta Perangkat Daerah Teknis;
3. Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Perumusan Isu Strategis pada Tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Kurangnya Pemahaman Peraturan Tentang Pelayanan Publik, Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan dan informasi publik;
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan inovasi;
3. Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat;
4. Heterogenya Kultur Budaya Masyarakat;
5. Kurangnya Profesionalitas Aparatur Desa;
6. Kurangnya Profesionalitas terhadap tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara.

D. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20);
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 47).

E. SISTEMATIKA

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“ SUMENEP UNGGUL, MANDIRI, DAN SEJAHTERA “

MISI :

- Misi 1** : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
- Misi 2** : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu ke Hilir.
- Misi 3** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4** : Melaksanakan Pembangunan Berasas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal
- Misi 5** : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Misi Ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi
Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Tanggap Dan Inovatif	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif Berbasis E-government	Indeks SPBE
				Nilai IKM

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
				Indeks Inovasi Daerah
			Pengembangan Kapasitas ASN Pemerintahan Daerah	Indeks Profesionalisme Aparatur
			Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel Dan Transparan	Nilai SAKIP
				Opini Atas Audit Badan Pemeriksa Keuangan
				Tingkat Maturitas SPIP

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	81	82	83	84	85
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data																																				
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan																																					
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pengukuran dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat berupa angka	$\text{IKM} = \text{NRR Tertimbang} \times 25$ $\text{NRR Tertimbang} = \text{NRR Per Unsur} \times 0,11$ <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">IKM UNIT PELAYANAN :</p> <p style="text-align: center;">Mutu Pelayanan :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">A (Sangat Baik)</td> <td style="width: 10%;">=</td> <td style="width: 10%;">88,01</td> <td style="width: 10%;">-</td> <td style="width: 10%;">100,00</td> </tr> <tr> <td>B (Baik)</td> <td>=</td> <td>76,61</td> <td>-</td> <td>88,30</td> </tr> <tr> <td>C (Kurang Baik)</td> <td>=</td> <td>65,00</td> <td>-</td> <td>76,60</td> </tr> <tr> <td>D (Tidak Baik)</td> <td>=</td> <td>25,00</td> <td>-</td> <td>64,99</td> </tr> </table> </div>	A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00	B (Baik)	=	76,61	-	88,30	C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60	D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat																
A (Sangat Baik)	=	88,01	-	100,00																																						
B (Baik)	=	76,61	-	88,30																																						
C (Kurang Baik)	=	65,00	-	76,60																																						
D (Tidak Baik)	=	25,00	-	64,99																																						
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	Survey Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Jumlah Bobot</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang</td> <td>=</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td>=</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: right;">= 0,11</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Survei Kepuasan Masyarakat</td> <td>=</td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td>X Nilai Penimbang</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">-----</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Total Unsur yang terisi</td> <td></td> </tr> </table> </div> <p>Dikonversikan dengan Nilai Dasar 25, dengan Rumus, yakni :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">25</td> </tr> </table> </div>		Jumlah Bobot	1		Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	-----	=			-----	=			9	= 0,11		Total dari Nilai Persepsi Per Unsur			Survei Kepuasan Masyarakat	=	-----	X Nilai Penimbang			-----				Total Unsur yang terisi			Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan	X	25	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
	Jumlah Bobot	1																																								
Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang	=	-----	=																																							
		-----	=																																							
		9	= 0,11																																							
	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur																																									
Survei Kepuasan Masyarakat	=	-----	X Nilai Penimbang																																							

		Total Unsur yang terisi																																								
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan	X	25																																							

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan					Sumber Data																														
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan																																		
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> <th>Nilai Interval Konversi (NIK)</th> <th>Mutu Pelayanan (X)</th> <th>Kinerja Unit Pelayanan (Y)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,0000 s/d 2,5999</td> <td>25,00 s/d 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,6000 s/d 3,0640</td> <td>65,00 s/d 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0641 s/d 3,5323</td> <td>76,61 s/d 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 s/d 4,0000</td> <td>88,31 s/d 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)	1	1,0000 s/d 2,5999	25,00 s/d 64,99	D	Tidak Baik	2	2,6000 s/d 3,0640	65,00 s/d 76,60	C	Kurang Baik	3	3,0641 s/d 3,5323	76,61 s/d 88,30	B	Baik	4	3,5324 s/d 4,0000	88,31 s/d 100,00	A	Sangat Baik									
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)																																			
1	1,0000 s/d 2,5999	25,00 s/d 64,99	D	Tidak Baik																																			
2	2,6000 s/d 3,0640	65,00 s/d 76,60	C	Kurang Baik																																			
3	3,0641 s/d 3,5323	76,61 s/d 88,30	B	Baik																																			
4	3,5324 s/d 4,0000	88,31 s/d 100,00	A	Sangat Baik																																			
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terasilitasi	%	Rasio jumlah desa yang terfasilitasi merupakan perbandingan jumlah desa di Kecamatan dengan jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi terkait Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan ketertiban Umum, dan Kesejahteraan rakyat	$\frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pemerintahan Desa}} \times 100$				Report Base Data di Kecamatan																														
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja	Penilaian AKIP : ✓ (35%) Perencanaan Kinerja ✓ (20%) Pengukuran Kinerja ✓ (15%) Pelaporan Kinerja ✓ (10%) Evaluasi Kinerja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angkat</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>AA</td> <td>95 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>A</td> <td>85 - 95</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BB</td> <td>75 - 85</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>B</td> <td>65 - 75</td> <td>Baik, perlu sedikit perbaikan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td>50 - 65</td> <td>Cukup Baik (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>D</td> <td>30 - 50</td> <td>Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>E</td> <td>0 - 30</td> <td>Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angkat	Interpretasi	1	AA	95 - 100	Sangat Memuaskan	2	A	85 - 95	Memuaskan	3	BB	75 - 85	Sangat Baik	4	B	65 - 75	Baik , perlu sedikit perbaikan	5	C	50 - 65	Cukup Baik (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	6	D	30 - 50	Agak Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar	7	E	0 - 30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	Hasil pengolahan data Survey Kepuasan Masyarakat
No	Kategori	Nilai Angkat	Interpretasi																																				
1	AA	95 - 100	Sangat Memuaskan																																				
2	A	85 - 95	Memuaskan																																				
3	BB	75 - 85	Sangat Baik																																				
4	B	65 - 75	Baik , perlu sedikit perbaikan																																				
5	C	50 - 65	Cukup Baik (Memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar																																				
6	D	30 - 50	Agak Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar																																				
7	E	0 - 30	Kurang , perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar																																				

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan		Sumber Data
				Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah merupakan indikator untuk menilai seberapa besar pencapaian Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengukur realisasi target capaian kinerja	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Capaian Kinerja}} \times 100$	Report Base Data di Kecamatan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	82
		Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Tanggal Dua Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep
Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan				
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	Nilai	85	84
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	%	100	100
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				
2.1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Saronggi	Nilai SAKIP	Nilai	B	
	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	2.752.401.312	2.752.401.692
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	6 Dokumen	9 Dokumen	8.840.600	8.840.600
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	12 Laporan	12 Laporan	2.356.438.651	2.356.438.651
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	29 Jenis	29 Jenis	17.850.000	17.850.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	83.069.920	83.069.920
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan	2 Unit	2 Unit	61.261.000	61.261.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	119.598.660	119.598.660
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	40 Unit	40 Unit	105.336.681	105.336.681
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	13.372.000	13.372.000
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	13.372.000	13.372.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	39.331.739	39.331.739
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	4.851.139	4.851.139
3.2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan Lembaga kemasyarakatan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.481.400	14.481.400

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		Anggaran	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan	12Laporan	12Laporan	19.999.200	19.999.200
4.1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	11.380.400	11.380.400
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	11.380.400	11.380.400
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	171.814.800	171.814.800
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	12 Laporan	12 Laporan	171.814.800	171.814.800
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	14.816.800	14.816.800
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	12 Laporan	14.816.800	14.816.800
JUMLAH					3.003.117.051	3.003.117.431

Sumber : DPA dan DPPA Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

Nomor	Kategori / Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendang	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	85 Nilai	81 Nilai	98,78%	Sangat Tinggi	-
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	84 Nilai	81 Nilai	98,78%	Sangat Tinggi	SKM
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%	Sangat Tinggi	Evaluasi Hasil Renja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian	Belum ada penilaian	-
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	Sangat Tinggi	Evaluasi Hasil Renja

Uraian penjelasan tabel :

SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 untuk Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Belum Ada Penilaian sehingga tidak bisa menentukan tingkat kategori capaian.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	85 Nilai	83 Nilai	97,61%	85 Nilai	83 Nilai	97,63%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	80 Nilai	97,56%	82 Nilai	81 Nilai	98,78%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	B Nilai	75,25	B Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Pelayanan Publik di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 97,56% dan pada Tahun 2023 capaian sebesar 98,78% sehingga capaian naik sebesar 1,28% dari tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir Tahun 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	85 Nilai	96,47%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	85 Nilai	96,47%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Uraian penjelasan tabel :

Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis dari Target Akhir Tahun 2026 untuk Meningkatnya Mutu Layanan Publik di Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yaitu pada Tahun 2023 sebesar 96,47% dan Tahun 2022 sebesar 95,12% sehingga persentase tingkat kemajuan capaian naik sebesar 1,35%.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	87 Nilai	94,25%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	87 Nilai	94,25%
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terasilitasi	100 %	100 %	100,00%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	A Nilai	Belum ada penilaian
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai IKM Kecamatan	82 Nilai	81 Nilai	96,47%		
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	82 Nilai	81 Nilai	96,47%		
1.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Profesionalisme pelaksana layanan publik relatif masih rendah atas Kebijakan Pelayanan berbasis Sistem	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
1.1.1.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
1.1.1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100 %	100 %	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.2.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Rendahnya publikasi program dan kegiatan yang dilaksanakan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa
1.2.1.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	14 Laporan	14 Laporan	100,00%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	100,00%		
1.2.1.2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	15 Keluarga	15 Keluarga	100,00%		
1.2.2	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100 %	100 %	100,00%	Minimnya kesadaran keselarasan dalam pemahami kultur sosial dan budaya masyarakat	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat
1.2.2.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	5 Laporan	5 Laporan	100,00%		
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100,00%		
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.2.3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100 %	100 %	100,00%	Kurang kuatnya pemahaman ideologi kebangsaan dan integrasi kemasyarakatan	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
1.2.3.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	14 Laporan	14 Laporan	100,00%		
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100 Orang	100 Orang	100,00%		
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%		
1.2.4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100 %	100 %	100,00%	Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Aparatur Desa kurang memadai	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1.2.4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5 Laporan	5 Laporan	100,00%		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%		
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%		
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%		
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai	Belum ada penilaian		
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%		
2.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 %	100 %	100,00%	Kurangnya pemahaman atas tugas dan fungsi aparat sipil negara	Pembinaan dan bimbingan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep
2.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%		
2.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	20 Laporan	20 Laporan	100,00%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	100,00%		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	100,00%		
2.1.1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	1 Jenis	1 Jenis	100,00%		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17 Paket	17 Paket	100,00%		
2.1.1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17.120 Jenis	17.120 Jenis	100,00%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	178 Paket	178 Paket	100,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	124 Paket	124 Paket	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15.558 Paket	15.558 Paket	100,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10.800 Paket	10.800 Paket	100,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568 Laporan	568 Laporan	100,00%		
2.1.1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	7 Unit	7 Unit	100,00%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100,00%		
2.1.1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100,00%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	100,00%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%		
2.1.1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	100,00%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100,00%		

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	100,00%		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00%		

Uraian penjelasan tabel :

Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, terus menerus mengadakan pembinaan dan bimbingan atas pemahaman :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sumenep.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	96,47%				
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	Nilai SKM Kecamatan	96,47%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100,00%	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100,00%	
1.2	Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa	Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi	100,00%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100,00%	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100,00%	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100,00%	
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100,00%	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI	100,00%	
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100,00%	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100,00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	100,00%	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100,00%	
				Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00%	
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Belum ada penilaian				
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Program Sangat Tinggi
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100,00%	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100,00%	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100,00%	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100,00%	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa yang disediakan	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100,00%	Menunjang, Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Sangat Tinggi
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100,00%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	

Uraian penjelasan tabel :

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN KINERJA DARI SISI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN :

Kurang tercapainya indikator Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi disebabkan oleh tidak tercapainya salah satu target kinerja program pendukungnya yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Dengan indicator Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan Yang ditargetkan 100% terealisasi 60,66%.

Sedangkan tidak tercapainya kinerja program tersebut disebabkan oleh :

a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Dengan indikator Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

Yang ditargetkan 100% terealisasi 60,66%.

Hal ini disebabkan karena tidak tercapainya kinerja :

➤ Sub Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan umum pemerintah daerah

Dengan indikator penyediaan jasa di Kecamatan

Yang ditargetkan 100% terealisasi 60,66%.

Tidak tercapainya kinerja sub kegiatan disebabkan oleh :

a. Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Kurang kuatnya pemahaman ideologi kebangsaan dan integrasi kemasyarakatan

b. Faktor Kebijakan

Ideologisasi kebangsaan dan kemasyarakatan

c. Faktor SDM Pelaksana

Kurangnya Persentase Tingkat kehadiran narasumber

Selain penghambat keberhasilan tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung diatas, juga disebabkan oleh sasaran program walaupun tercapai 100%, namun berdasarkan CSF (*critical success factor*) sebagaimana diurai dalam pohon kinerja hasil rewiu terdapat sasaran program yang tidak memiliki kausalitas dalam mewujudkan sasaran strategis dimaksud adalah :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sasaran Program “Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Saronggi”, Indikator “Nilai SAKIP” tidak relevan sebagai penunjang terwujudnya sasaran Strategis dengan indikator tersebut diatas. Adapun sasaran program yang relevan adalah “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator “Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah”. Dengan demikian maka sasaran kegiatan dan sub kegiatan penunjang kegiatan ini perlu disesuaikan dengan pohon kinerja.

ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN KINERJA DARI SISI KINERJA PROGRAM/KEGIATAN :

a. Tercapainya indikator Nilai SKM Kecamatan, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Dengan indicator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan di Kecamatan Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, yang ditargetkan 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, yang ditargetkan 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan, dengan capaian 100%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.
Peningkatan Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
- b) Faktor Kebijakan
Pelayanan Berbasis Sistem
- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana
Profesionalisme Pelaksana Layanan Publik

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**SoLa (Layanan Sosial Media)**”, dengan Deskripsi yaitu Pembuatan akun media sosial dan web whatsapp group internal dan eksternal serta pencantuman Nomor Kontak PNS Kecamatan Saronggi dalam rangka Pendekatan, percepatan, pengayoman, serta pemudahan segala urusan pelayanan masyarakat.

b. Tercapainya indikator Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Dengan indicator Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Pembangunan di Kecamatan

Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan indikator Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan desa yang dilaksanakan, yang ditargetkan 14 Laporan, terealisasi 14 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

✓ Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, yang ditargetkan 14 Lembaga Kemasyarakatan, terealisasi 14 Lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan indikator Jumlah Laporan Keluarga yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

✓ Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, dengan indikator Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat, yang ditargetkan 17 Keluarga, terealisasi 17 Keluarga, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat

- b) Faktor Kebijakan
Pelaksanaan Pameran Pembangunan
- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana
Pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi
- d) Faktor Inovasi
Inovasi “**Saronggi Berdaya**”, dengan Deskripsi yaitu Pemberdayaan Desa di Bidang UMKM yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Tim Penggerak PKK dan Karang Taruna demi Peningkatan Perekonomian Masyarakat.

➤ **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Dengan indikator Persentase Kerjasama Penanganan dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana

Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator Jumlah laporan koordinasi lintas sektor ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan, yang ditargetkan 5 Laporan, terealisasi 5 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, yang ditargetkan 4 Laporan, terealisasi 4 Laporan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, yang ditargetkan 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.
Sinergitas dan Harmonisasi Hubungan Ulama dan Umaro
- b) Faktor Kebijakan
Peningkatan Hubungan Intimasi Ulama dan Umaro
- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana
Kohesifitas masyarakat lebih dinamis

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Saronggi Bisa**”, dengan Deskripsi yaitu Bimbingan, Monitoring dan Pengawasan Desa dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan Desa serta Pendekatan kepada Ulama, Umara, dan Lembaga / Organisasi Masyarakat melalui Silaturahmi.

➤ **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Dengan indikator Persentase koordinasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan indikator Jumlah laporan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI, yang ditargetkan 100 Orang, terealisasi 100 Orang, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan indikator Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, yang ditargetkan 12 Dokumen, terealisasi 12 Dokumen, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Multikulturalisme menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keragaman budaya

b) Faktor Kebijakan

Ideologisasi kebangsaan dan kemasyarakatan

c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Menciptakan masyarakat heterogen yang damai dan adil

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Pemuda Saronggi**”, dengan Deskripsi yaitu Pemanfaatan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan Karang Taruna Tingkat Kecamatan dan Desa dalam memberikan informasi kepada khalayak masyarakat melalui Media Online.

➤ **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Dengan indicator Persentase pemerintahan desa yang sudah diberikan pembekalan

Yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan indikator Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang ditargetkan 5 Laporan terealisasi 5 Laporan dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang ditargetkan 14 Dokumen, terealisasi 14 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang ditargetkan 3 Dokumen, terealisasi 3 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yang ditargetkan 14 Dokumen, terealisasi 14 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, yang ditargetkan 14 Dokumen, terealisasi 14 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan indikator Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang ditargetkan 14 Dokumen, terealisasi 14 Dokumen, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa

b) Faktor Kebijakan

Peningkatan Kinerja Aparatur Desa Berbasis Sistem

c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Profesionalisme Kinerja Aparatur Desa

d) Faktor Inovasi

Inovasi “**Saronggi Berdikari**”, dengan Deskripsi yaitu Memberikan Motivasi dan mengarahkan kepada Pemerintah Desa untuk Meraih Status Desa Mandiri.

c. Tercapainya indikator Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh optimalnya capaian program, yaitu :

➤ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Dengan indikator Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor, yang ditargetkan 100%, terealisasi 100%, dengan capaian 100%.

Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun, yang ditargetkan 9 Dokumen, terealisasi 9 Dokumen, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang ditargetkan 4 Dokumen, terealisasi 4 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen dengan capaian 100%
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan

Dokumen DPA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, yang ditargetkan 1 Dokumen, terealisasi 1 Dokumen, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang ditargetkan 1 Laporan, terealisasi 1 Laporan, dengan capaian 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun, yang ditargetkan 20 Laporan, terealisasi 20 Laporan, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, yang ditargetkan 23 Orang/ bulan, terealisasi 23 Orang/ bulan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, yang ditargetkan 20 Laporan, terealisasi 20 Laporan, dengan capaian 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah Jenis Layanan Kepegawaian yang disediakan, yang ditargetkan 1 Jenis, terealisasi 1 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan yang ditargetkan 17 Paket, terealisasi 17 Paket, dengan capaian 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, yang ditargetkan 120 Jenis, terealisasi 120 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 178 Paket, terealisasi 147Paket, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang

Disediakan, yang ditargetkan 124 Paket, terealisasi 113 Paket, dengan capaian 100%.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, yang ditargetkan 12.328 Paket, terealisasi 12,328 Paket, dengan capaian 100%.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan, yang ditargetkan 8.800 Paket, terealisasi 8.800 Paket, dengan capaian 100%.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan, yang ditargetkan 12 Dokumen, terealisasi 12 Dokumen, dengan capaian 100%.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yang ditargetkan 568 Laporan, terealisasi 568 Laporan, dengan capaian 100%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang yang diadakan, yang ditargetkan 3 Unit, terealisasi 3 Unit, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan, yang ditargetkan 1 Unit, terealisasi 1 Unit, dengan capaian 100%.
 - ✓ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, yang ditargetkan 2 Unit, terealisasi 2 Unit, dengan capaian 100%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah layanan jasa yang disediakan, yang ditargetkan 7 Jenis, terealisasi 7 Jenis, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, yang ditargetkan 24 Laporan, terealisasi 24 Laporan, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan, yang ditargetkan 12 Laporan, terealisasi 12 Laporan, dengan capaian 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator Jumlah barang milik daerah yang dipelihara, yang ditargetkan 17 Unit, terealisasi 17 Unit, dengan capaian 100%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja Sub Kegiatan, yaitu :

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, yang ditargetkan 2 Unit, terealisasi 2 Unit, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara, yang ditargetkan 12 Unit, terealisasi 12 Unit, dengan capaian 100%.
- ✓ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, yang ditargetkan 3 Unit, terealisasi 3 Unit, dengan capaian 100%.

Keberhasilan tercapainya kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, disebabkan oleh :

- a) Faktor Objek Sasaran Kinerja.

Kinerja Aparatur lebih optimal, berinovatif dan berkreatif

- b) Faktor Kebijakan

Monivasi secara berkesinambungan

- c) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana

Peningkatan Profesionalitas tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara

- d) Faktor Inovasi

Inovasi “**eOffice**”, dengan Deskripsi yaitu Transformasi surat dalam bentuk digital yang diciptakan untuk merespon informasi berupa surat masuk atau keluar sehingga mengurangi penggunaan kertas .

ANALISIS EFISIENSI

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Mutu Layanan Publik”. Dengan indikator “Nilai SKM Kecamatan” tercapai 98,96% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 99,63% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 1,04% atau senilai Rp.140.400,-
2. Kinerja Sasaran “Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Desa”. Dengan indikator “Rasio Jumlah Desa Yang Terfasilitasi” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian

penggunaan anggaran sebesar 86,88% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 13,12% atau senilai Rp.33.841.465,-

3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah”. Dengan indikator “Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah” tercapai 100% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,16% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 4,84% atau senilai Rp.114.051.630,-

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, Sebesar 99,59%, dengan capaian penggunaan anggaran 92,04% dari total pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran maka Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan kinerja Tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sebesar 7,96% atau senilai Rp.219.091.144,-

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.752.401.312	2.476.468.997	95,16%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.846.400	8.840.600	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.612.000	5.612.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	647.800	647.000	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	648.600	646.200	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	644.400	644.400	100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	646.200	646.000	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	647.400	645.000	100,00%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.356.438.651	2.125.873.942	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.352.766.651	2.122.207.942	92,86%%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.672.000	3.666.000	100,00%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.850.000	17.800.000	98,99%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	17.850.000	17.800.000	98,99%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	83.069.920	80.604.100	97%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.571.200	6.570.000	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.099.520	4.086.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.573.200	19.559.300	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.520.000	5.518.000	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.584.000	1.562.000	99%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.722.000	43.308.800	95%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.261.000	55.090.000	90%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.326.000	6.300.000	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.935.000	48.790.000	89%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.598.660	86064255	100,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.386.400	10339000	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.202.400	14815255	79,17%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.120.000	8110000	88,89%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.889.860	52800000	83,33%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.336.681	102.196.100	97,50%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.854.240	37.773.600	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.285.000	3.252.500	100,00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	61.197.441	61.170.000	100,00%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	13.372.000	13.360.000	100,00%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.372.000	13.360.000	100,00%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.868.800	4.864.000	100,00%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.503.200	8.496.000	100,00%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	39.331.739	34238400	100,00%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	39.331.739	0	0,00%

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.851.139	0	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	14.481.400	14.477.000	100,00%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	3.477.200	3.476.000	100,00%
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000	7.200.000	100,00%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.804.200	3.801.000	100,00%
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	19.999.200	19.761.400	100,00%
4.1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.380.400	11.369.000	100,00%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.380.400	11.369.000	100,00%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4.183.200	4.183.000	100,00%
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.197.200	7.186.000	100,00%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	171.814.800	104230000	75,00%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	171.814.800	104230000	100,00%
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	56.270.600	56149000	100,00%
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.784.200	3781000	100,00%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	111.760.000	44300000	75,00%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.816.800	14809000	100,00%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14.816.800	14.809.000	100,00%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.778.200	3.777.000	100,00%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.711.400	4.706.000	100,00%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.327.200	6.326.000	100,00%
	JUMLAH	2.752.401.312	2.654.475.397	92,04%

C. TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan	82 Nilai	81 Nilai	98,78%	13.500.000	13.360.000	98,96%	1,04%
1.1	Meningkatnya Mutu Layanan Publik	82 Nilai	81 Nilai	98,78%	13.500.000	13.360.000	98,96%	1,04%
	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100,00%	13.500.000	13.360.000	98,96%	1,04%
1.2	Meningkatkan Fasilitas dan Koordinasi Desa	100 %	100 %	100,00%	257.938.000	202.403.600	98,96%	13,12%
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100,00%	39.331.739	34.238.400	98,96%	12,95%
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100,00%	11.380.400	11.369.000	86,88%	0,11%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100,00%	171.814.800	104.230.000	87,05%	39,34%
	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100,00%	14.816.800	14.809.000	99,89%	0,06%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB Nilai	Tidak DiNilai		2.356.438.651	2.125.873.942	60,66%	4,84%
2.1	Meningkatnya Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%	2.356.438.651	2.125.873.942	99,94%	4,84%
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%	2.356.438.651	2.125.873.942	95,16%	4,84%
	JUMLAH	100 %	100 %	100,00%	2.752.401.312	2.654.475.397	92,04%	7,96%

Uraian penjelasan tabel :

Anggaran untuk tujuan “Meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan” dengan Target sebesar Rp.13.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.13.360.000,00 dengan Capaian 98,96% dan atau Tingkat Efisiensi sebesar 1,04%

Anggaran untuk tujuan “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah” dengan Target sebesar Rp.2.356.438.651,00 terealisasi sebesar Rp. 2.125.873.942,00 dengan Capaian 95,16% dan atau Tingkat Efisiensi sebesar 4,84%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100,00%	2.356.438.651	2.125.873.942	95,16%	4,94%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%	8.846.400	8.840.600	100,00%	1,046%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	2.356.438.651	2.125.873.942	92,86%	6,85%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29 Jenis	1=29 Jenis	100,00%	17.850.000	17.800.000	99,71%	1,01%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis	100,00%	83.069.920	80.604.100	97,03%	0,03%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	2 Unit	100,00%	61.261.000	55.090.000	89,92%	5,23%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Jenis	12 Jenis	100,00%	119.598.660	86.064.255	71,96%	0,02%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40 Unit	40 Unit	100,00%	105.336.681	102.196.100	97,01%	0,01%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100,00%	13.500.000	13.360.000	98,96%	0,37%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	20 Laporan	20 Laporan	100,00%	13.500.000	13.360.000	98,96%	0,87%
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100,00%	39.331.739	34.238.400	87,05%	0,31%
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	14 Laporan	14 Laporan	100,00%	4.851.139	0	0%	0,00%
3.2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	1 Kegiatan	100,00%	19.999.200	19.761.400	98,81%	
3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	14.481.400	14.477.000	100,00%	0,35%
4.1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100,00%	11.380.400	11.369.000	99,89%	0,34%
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	11.380.400	11.369.000	99,89%	0,34%
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100,00%	171.814.800	104.230.000	60,66%	30,85%
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	171.814.800	104.230.000	60,66%	30,85%
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100,00%	14.816.800	14.809.000	99,94%	0,00%
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	14.816.800	14.809.000	99,94%	0,00%
	JUMLAH	100 %	100 %	100,00%	2.752.401.312	2.476.468.997	92,04%	7,96%

Uraian penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja dengan Capaian sebesar **100,00%** sedangkan penyerapan anggaran mencapai sebesar **92,04%** atau efisiensi sebesar **7,96%**. Hal ini menunjukkan perencanaan yang dilakukan dikategorikan sudah sangatlah baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan sebanyak 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,06% (Kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran sebanyak 3 (tiga) terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 93,66% (Kategori Sangat Tinggi);
- Sasaran Program sebanyak 6 (enam) terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 90,27% (Kategori Tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.752.401.312,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.476.468.997,00 dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2023 serapan anggaran sebesar 92.04% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 7,96%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 18 Januari 2024

CAMAT SARONGGI



KUSYADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196904101989031009



**PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP**

(LKjIP)
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023**

**KECAMATAN
SARONGGI**

